



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 171.1/Kep. 21 -DPRD/2021
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai mana di maksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005

Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 130 B);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purwakarta Nomor:188.342/3801/HUK tanggal 18 November 2021 tentang Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 19 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. 6 (enam) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 19 (sembilan belas) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Nopember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 171.1/Kep. 21 -DPRD/2021
Tanggal : 19 November 2021
Tentang : Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022.

A. Raperda yang berasal dari DPRD

1. Raperda tentang Dana cadangan pemilu serentak tahun 2024;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Raperda tentang Perubahan atas perda nomor 5 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang;
4. Raperda tentang Lahan pertanian pangan berkelanjutan
5. Raperda tentang Percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
6. Raperda tentang Penyediaan, penyerahan dan pengelolaan sarana prasarana utilitas umum pada kawasan perumahan perdagangan dan jasa serta kawasan industri;

B. Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah (Bupati)

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2022;
3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2023;
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5. Raperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
7. Raperda tentang Penyelenggaraan Transfortasi;
8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
10. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;
12. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten ;
13. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
16. Raperda tentang Penyelenggaraan RTRW di Kabupaten Purwakarta tahun 2022-2042;

17. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan;
18. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Hewan;
19. Raperda tentang Pencabutan Beberapa Perda di Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Nopember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI